

Evaluasi Program Indonesia Pintar Sebagai Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Dan Kurikulum

Jeffry Sony Junius Lengkong¹, Suiling Pontoh², Maria Kaparang³, Victor Nomel Kumajas⁴

^{1,2,3,4}Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618
jeffrylengkong@unima.ac.id

Abstract

This research aims to evaluate the Smart Indonesia Program (PIP) as a policy to increase educational and curriculum equality. This research uses qualitative methods with library study techniques based on data all sourced from national journal databases. At the same time, appropriate search terms are a prerequisite for accurate data acquisition. To make search results as comprehensive and accurate as possible, the Authorb of Science core collection was selected for this study. This research uses the subject "Curriculum Management and the Smart Indonesia Program". The results of this research show that the challenge in evaluating context is the mismatch between regulations at the central and school levels (regulations of the Secretariat General of the Ministry of Education and Culture and standard operating procedures (SOP) in all schools in Indonesia. Schools must be involved in student verification and validation to determine which students will receive PIP funds so that they are truly targeted. There is no clear SOP for the data that will be submitted as a database of PIP recipients

Keywords: Smart Indonesia, Curriculum, Program, Evaluation, Students

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai kebijakan peningkatan kesetaraan pendidikan dan kurikulum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka berdasarkan data yang semuanya bersumber dari database jurnal nasional. Pada saat yang sama, istilah pencarian yang tepat merupakan prasyarat untuk perolehan data yang akurat. Untuk membuat hasil pencarian sekomprensif dan seakurat mungkin, koleksi inti Authorb of Science dipilih untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan subjek "Manajemen Kurikulum dan Program Indonesia Pintar". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tantangan dalam mengevaluasi konteks adalah ketidaksesuaian antara peraturan di tingkat pusat dan sekolah (peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh sekolah di daerah Indonesia. Pihak sekolah harus dilibatkan dalam verifikasi dan validasi siswa untuk menentukan siswa mana yang akan menerima dana PIP agar benar-benar tepat sasaran. Tidak ada SOP yang jelas antara data yang akan diserahkan sebagai database penerima PIP

Kata Kunci: Indonesia Pintar, Kurikulum, Program, Evaluasi, Siswa

Copyright (c) 2024 Jeffry Sony Junius Lengkong, Suiling Pontoh, Maria Kaparang, Victor Nomel Kumajas

□ Corresponding author: Jeffry Sony Junius Lengkong

Email Address: jeffrylengkong@unima.ac.id (Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618)

Received 8 May 2024, Accepted 12 May 2024, Published 18 May 2024

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran didaktik tradisional tidak mampu beradaptasi dengan periode globalisasi saat ini, dan gagal memberikan bantuan yang tepat kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan industri eksternal, terlebih lagi, strategi ini kurang mampu memenuhi harapan globalisasi. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengusulkan proyek, "Masa Depan Pendidikan dan Keterampilan 2030", pada tahun 2018 untuk membantu negara-negara di dunia dengan inovasi pendidikan yang berfokus pada kompetensi yang dibutuhkan siswa dan metode pengajaran yang sesuai yang dibutuhkan guru. harus digunakan untuk membimbing siswa secara efektif mempelajari sikap dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk masa depan (Muqti, 2019).

Kompetensi inti merupakan sasaran pengembangan kurikulum Kurikulum Pendidikan Dasar 12 Tahun yang bertujuan untuk mencapai hasil yang sama, yaitu menumbuhkan kemampuan praktis peserta didik, sebagaimana pedoman kurikulum sebelumnya. Baik konsep “literasi” maupun “kemampuan” berasal dari kata bahasa Inggris “competence” dan “competency”, yang mana kompetensi berarti kemampuan internal dari kinerja perilaku, sedangkan kompetensi berarti kualitas dan karakteristik internal. Pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan menekankan bahwa tidak ada model yang pasti untuk pengajaran berorientasi kompetensi, dan ini bukan satu-satunya standar. PrinPIP-prinPIP pengajaran berorientasi kompetensi dikembangkan dari maknanya, dan terdapat tiga dimensi dan sembilan item kompetensi inti, yaitu poin-poin kunci pengajaran interdiPIPliner, dan pengajaran berorientasi kompetensi memiliki empat prinPIP utama (integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap; pembelajaran terletak; metode dan strategi pembelajaran; pemanfaatan dan implementasi) untuk digunakan guru dalam merancang kurikulum.

Empat poin kunci pembelajaran berorientasi kompetensi yang dikembangkan oleh Chan dan Huang (2020) berdasarkan 108 pedoman kurikulum baru, sentimen, dan pendapat pakar pendidikan dalam negeri adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengkonversi poin-poin kunci pembelajaran dan membentuk sasaran pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap; (2) mengembangkan materi pembelajaran dan menghubungkannya dengan konteks situasi dunia nyata guna mengembangkan kegiatan pembelajaran berorientasi kompetensi yang bermakna; (3) membimbing penyelidikan aktif siswa dan penerapan apa yang telah mereka pelajari dan, pada saat yang sama, mengembangkan kegiatan pembelajaran berorientasi kompetensi yang membantu memperkuat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah; (4) merencanakan dan merancang tugas praktik situasional untuk mendorong keterpaduan dan pelaksanaan proses pembelajaran berorientasi kompetensi bagi siswa. Kesimpulannya, ketika strategi penerapan pengajaran berorientasi kompetensi dipertimbangkan oleh guru dari berbagai bidang di mana konteks kehidupan diintegrasikan ke dalam pengajaran kurikulum, siswa akan dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan pada saat yang sama, kognisi multi-level dan pembelajaran efektif dikembangkan, menghasilkan pengembangan pembelajaran mandiri, kemampuan komunikasi dan interaksi siswa dalam kegiatan pembelajaran dan mendorong keterlibatan dalam partiPIPasi sosial, dan oleh karena itu, kemampuan belajar sepanjang hayat siswa akan dikembangkan.

Tsai (2020) mengatakan bahwa kompetensi inti dapat dibimbing melalui pendidikan, yang dapat direncanakan melalui kurikulum, dikembangkan melalui pengajaran, dan dievaluasi melalui penilaian, dan pencapaiannya dapat diperoleh melalui pembelajaran.

Chen et al. (2021) mengintegrasikan kurikulum berorientasi kompetensi dengan kunjungan lapangan dan menggunakan alat pengalaman realitas virtual untuk menguji efektivitas belajar siswa, di mana mereka menemukan bahwa siswa akan memperoleh pemahaman ekspresi yang beragam, penerapan, interpretasi, dan sudut pandang mengenai pembelajaran inkuiri. Deng (2018; 2022) mengembangkan desain kurikulum berorientasi kompetensi untuk museum dan sekolah, dan juga,

mereka melakukan pengajaran tim dalam kurikulum berorientasi kompetensi melalui sumber daya eksternal dan menemukan bahwa terdapat efek pembelajaran yang mendalam dan luas dalam mata pelajaran seni, alam, membaca, dan kurikulum lapangan yang komprehensif (Ninghardjanti, 2023).

Yu (2021) menerapkan kurikulum berorientasi kompetensi sebagai bagian dari kurikulum praktik berbasis proyek di sekolah menengah atas berbasis keterampilan di mana siswa Departemen Teknik Kontrol memanfaatkan LED dengan baik di lingkungan rumah tangga, dan dia juga menemukan bahwa ketika kurikulum dipadukan dengan kenyataan, guru harus membantu siswa menghasilkan solusi dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masa depan (Hafrienda, 2023). Konsekuensinya, kurikulum berorientasi kompetensi bertujuan untuk mengangkat guru ke posisi instruktif dan pembimbing proses pembelajaran dan penolong, sedangkan siswa adalah pembelajar mandiri, dan pada saat yang sama, hal ini akan mendorong siswa untuk menghubungkan konteks situasi kehidupan mereka dengan konteks kehidupan mereka. pengalaman belajar mereka untuk menumbuhkan kapasitas mereka untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kasih sayang, dan juga, untuk memperkuat banyak kemampuan belajar interdiPIPliner/lintas wilayah dan seumur hidup.

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini. Pada tahun 2017, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tercatat sebesar 9,8% atau setara dengan 25,8 juta jiwa, sehingga mengakibatkan ketimpangan akses di banyak sektor. Ketika krisis keuangan Asia menghantam perekonomian pada tahun 1998, tingkat kemiskinan meningkat menjadi 24,2%. Di sisi lain, setelah krisis ekonomi, kemiskinan menurun dari 24,2% pada tahun 1998 menjadi 9,4% pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa dekade terakhir, yang didorong oleh ekspor dan konsumsi rumah tangga, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian ini.

Angka kemiskinan yang tinggi menyebabkan ketimpangan, dimana ketimpangan membebani pemerataan akses, terutama terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kesulitan paling serius dalam pengentasan kemiskinan mungkin terjadi ketika negara Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi pertama dalam kurun waktu hampir 20 tahun akibat epidemi COVID-19. Epidemi ini mengakibatkan gangguan sosial karena jutaan orang berpotensi jatuh miskin. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan yang ada perlu ditinjau ulang untuk mengimbangi hambatan yang semakin besar. Dari sisi pendidikan, kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Diketahui bahwa 8% penduduk Indonesia berusia 15–24 tahun tidak menyelesaikan sekolah dasar, 36% laki-laki dan 35% perempuan putus sekolah (tidak menyelesaikan pendidikan), dan hanya 16% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki pendidikan tinggi. Rendahnya pencapaian pendidikan Indonesia mengakibatkan rendahnya nilai tes PISA yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-36 dunia.

Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan pendukung untuk meningkatkan nilai tes PISA, termasuk membuat tes berstandar nasional, meningkatkan kualitas pendidikan melalui

pengembangan kurikulum, dan mengadakan pelatihan guru rutin tahunan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah langkah untuk mengurangi kemiskinan, seperti program pendidikan gratis, yang secara langsung akan meningkatkan akses terhadap pendidikan. Namun program tersebut belum dapat dilaksanakan secara nasional karena terbatasnya sumber daya pemerintah daerah, karena otonomi sehingga diperlukan perbaikan lebih lanjut. Selain itu, pendekatan pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan adalah dengan menggunakan program subsidi dan bantuan langsung tunai sebagai bentuk bantuan sekolah. Bantuan pemerintah terbukti secara signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan sebesar 0,3% per tahun sejak tahun 2012 hingga 2016.

Bentuk bantuan langsung tunai sekolah yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Konsep dasar PIP adalah memberikan bantuan langsung tunai kepada pelajar Indonesia yang tidak dapat mengakses sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas untuk membayar biaya sekolah dan kebutuhan sekunder seperti buku dan perlengkapan sekolah lainnya.

Selain itu, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program ini bertujuan untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, dan memenuhi kebutuhan sekolahnya. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa putus sekolah karena kekurangan dana

Penerapan PIP telah memberikan dampak positif di beberapa daerah, seperti Kabupaten Harjaukti. PIP terbukti mampu mencegah anak putus sekolah dan mengakomodir kebutuhan anak putus sekolah. Di Provinsi Gorontalo, PIP juga menunjukkan 90% sebaran angka efektif dan berkontribusi positif terhadap tingkat kehadiran madrasah. Selanjutnya di Kabupaten Banyumas, penerapan PIP di sekolah dasar sudah berjalan sesuai rencana. Secara positif, tidak dapat dipungkiri bahwa PIP telah memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan di beberapa daerah di Indonesia (Fiqih, 2022).

Namun, proses penerapan PIP juga merupakan tantangan bagi beberapa daerah. Di Kabupaten Tasikmalaya, karena PIP kurang memiliki prinsip akuntabilitas, maka penyaluran dana PIP tidak dikelola dengan baik. Di Kota Pekanbaru, kualitas bantuan yang diberikan oleh Program Indonesia Pintar seringkali buruk karena kurangnya koordinasi, kurangnya sosialisasi, dan lambatnya prosedur pembayaran. Begitu pula di wilayah Yogyakarta, PIP gagal menjalankan perannya dalam menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, karena orang tua siswa belum sepenuhnya mendapat pendidikan tentang PIP. Oleh karena itu, beberapa permasalahan dalam implementasi PIP harus diidentifikasi dan dianalisis karena dapat menjadi tantangan yang memberatkan dalam implementasi PIP secara nasional.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi PIP di

beberapa daerah di Indonesia. Pertama, masalah penargetan dan pendistribusian program PIP. Ada dua temuan yang menyebabkan masalah ini perlu dievaluasi. Penyaluran PIP dinilai berhasil dan tepat sasaran sesuai kriteria yang ditentukan. Di sisi lain temuan tersebut, terdapat beberapa peneliti yang menyatakan bahwa penyaluran PIP dinilai belum berhasil, terutama terkait sasaran yang belum tepat. Ketidaktepatan sasaran ini disebabkan oleh proses dan birokrasi yang tidak berjalan sesuai prosedur, khususnya terkait pengajuan calon penerima PIP.

Kedua, isu dampak program PIP. Mengenai masalah ini juga terdapat dua pendapat yang berbeda. Beberapa peneliti menyatakan bahwa program PIP mempunyai dampak positif terhadap siswa, seperti meningkatkan motivasi belajar, dengan meredakan kekhawatiran siswa mengenai biaya bersekolah—yang membebaskan mereka dari keharusan bekerja sepulang sekolah, meningkatkan prestasi akademik, karena siswa memiliki lebih banyak waktu untuk belajar daripada bekerja sepulang sekolah—dan kemauan untuk belajar, karena pemerintah menawarkan materi belajar gratis dan berkualitas tinggi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa PIPs tidak memberikan dampak apa pun terhadap siswa dalam hal pembelajaran kecuali jika keberadaan PIPs memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti proses pendidikan formal.

Isu ketiga adalah mengenai penggunaan dana program PIP. Berdasarkan beberapa temuan, penggunaan dana PIP dikatakan tepat yaitu untuk pembiayaan pendidikan, namun pada temuan lain penggunaan dana PIP kurang tepat. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian komprehensif mengenai evaluasi kebijakan PIP.

Jika kita melihat pendapat para ahli mengenai evaluasi program, mereka mengatakan bahwa serangkaian kegiatan dilakukan dengan sengaja untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program, dan hal ini disebut dengan evaluasi program. Evaluasi program juga dapat diartikan sebagai bentuk penelitian evaluatif, yaitu untuk mengetahui situasi dan kondisi suatu lingkungan. Evaluasi diterapkan dalam kondisi terencana atau tidak terencana. Evaluasi program di beberapa bidang dinilai sangat penting untuk mengoptimalkan program PIP. Dalam evaluasi program PIP diselidiki sejauh mana keberhasilan program PIP yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan .

Ketepatan sasaran dan ketepatan penggunaan dana yang diterima sangatlah penting, karena PIP yang diberikan kepada peserta dengan karakteristik sasaran yang tepat yaitu yang berasal dari keluarga miskin atau rentan akan mampu menunjang terwujudnya sumber daya manusia. kualitas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi PIP, khususnya di provinsi Jawa Tengah di Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini dibagi menjadi beberapa langkah. Pertama, penelitian ini mengumpulkan data terkait permasalahan yang terjadi pada penyaluran dana PIP di provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi (Uriyalita, 2020). Kedua, analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan analisis konteks, input, proses, dan produk (CIPP). Ketiga, setelah mengidentifikasi kendala-kendala pada setiap tahapan implementasi PIP dengan metode CIPP, maka dikembangkan mekanisme baru berdasarkan data tersebut. Provinsi Jawa Tengah dipilih karena

memiliki jumlah penerima PIP terbanyak dan sebagian besar merupakan siswa SMK (Liao, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka berdasarkan data yang semuanya bersumber dari database jurnal nasional. Pada saat yang sama, istilah pencarian yang tepat merupakan prasyarat untuk perolehan data yang akurat. Untuk membuat hasil pencarian sekomprensif dan seakurat mungkin, koleksi inti Author of Science dipilih untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan subjek “Manajemen Kurikulum dan Program Indonesia Pintar”.

HASIL DAN DISKUSI

Program PIP berhasil dilaksanakan dengan skor rata-rata 84,7%. Dapat disimpulkan bahwa PIP semakin berkontribusi dalam menunjang pendidikan siswa di tingkat sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, beberapa identifikasi kekuatan implementasi PIP adalah sebagai berikut:

(a) Partisi PIP siswa dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa indikator, seperti sekolah yang membimbing siswa mengikuti PIP (82,0% responden menjawab sangat setuju); peran sekolah dalam mengawasi proses pencairan PIP (82,0% responden menjawab sangat setuju); sekolah yang membimbing siswanya dalam mendaftar PIP (82,0% responden menjawab sangat setuju); sekolah memberitahukan siswanya ketika PIP telah dicairkan (90,8% responden menjawab sangat setuju); dan pihak sekolah memberitahukan siswanya bahwa mereka belum mengikuti PIP yang dimaksud (78% responden menjawab sangat setuju).

(b) Penyaluran dana PIP dinilai efektif dan tepat sasaran, dimana melalui partisi PIP mahasiswa diketahui dana PIP telah disalurkan sesuai kategori penerima yaitu keluarga miskin (75,6% menjawab sangat setuju); minimnya pemalsuan dokumen terkait (91,2% menjawab tidak setuju atas pemalsuan dokumen) dalam proses penyaluran dana PIP; dana PIP sesuai untuk kebutuhan sekolah (93,8% menjawab sangat setuju dan setuju); dan tidak ada potongan yang dibebankan bank penyalur kepada mahasiswa penerima dana PIP (86,3% menjawab sangat setuju).

(c) PIP mendukung sarana dan prasarana pembelajaran siswa, dimana 55,8% responden sangat setuju bahwa PIP bermanfaat bagi keluarga siswa dengan memfasilitasi kegiatan pembelajaran online. Selain manfaat penerapan PIP di wilayah penelitian, terdapat beberapa kelemahan yang dapat diringkas sebagai berikut:

(a) Belum adanya sinkronisasi peraturan di tingkat pusat dengan standar operasional prosedur (SOP) di tingkat lapangan, mulai dari pendistribusian hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal ini terungkap saat wawancara dengan beberapa kepala sekolah. Selain itu, belum adanya SOP yang jelas dalam pelaporan dana yang harus dilakukan oleh mahasiswa menjadi kendala tersendiri sehingga mengurangi aspek akuntabilitas penggunaan dana.

(b) Terkait data yang belum terintegrasi, diketahui bahwa data yang digunakan dalam

penyaluran PIP berbeda dengan data Dasar Pendidikan Nasional (DAPODIK) dan Kementerian Sosial. Melalui wawancara, hal ini diketahui mempengaruhi efisiensi penyaluran PIP yang berpotensi kurang tepat sasaran.

Setelah dilakukan analisa kelebihan dan kelemahan PIP, maka terdapat beberapa kemungkinan solusi, antara lain sebagai berikut:

1. Sinkronisasi peraturan di tingkat pusat berupa peraturan resmi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau peraturan terkait, dengan bentuk standar operasional prosedur (SOP) di tingkat pelaksana untuk mengurangi malpraktik administrative.
2. Perlunya database terpusat yang dikelola dengan SOP berkala untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pendistribusian PIP kepada pihak yang kurang berhak sehingga PIP dapat tepat sasaran;
3. Perlunya SOP khusus terkait pemantauan dan evaluasi penggunaan dana PIP agar tidak terjadi maladministrasi yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan anggaran pemerintah;
4. Perlu adanya monitoring terkait penggunaan dana PIP oleh penerima dana yang terintegrasi pada aplikasi PIPINTAR dengan menambahkan fitur kemahasiswaan (Huda, 2023).

Pedagogi pembelajaran aktif digabungkan dengan model-model ini; oleh karena itu, partisipasi aktif di kelas dan kontribusi siswa untuk menilai pengetahuan mereka sebelumnya dan kemudian berbagai strategi pembelajaran digunakan oleh guru serta kolaboratif, kooperatif dan berbasis masalah. Dalam format terbalik, struktur sudah ada, seperti kuis harian berisiko rendah, sehingga siswa akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan di luar kelas.

Kemajuan teknologi dalam lingkungan sinkron telah menawarkan manfaat bagi peserta didik dalam hal fleksibilitas, interaksi antar peserta, pertukaran pengetahuan, pengalaman dan umpan balik real-time antara guru dan siswa. Berbagai jenis ruang kelas dapat dibuat, dan kombinasi ruang kelas siber yang sinkron, papan tulis elektronik, sistem respons interaktif, dan hubungan yang ada dengan model pembelajaran PIP (Jumanah, 2023).

Dalam kerangka pendidikan, pembelajaran otonom, berdasarkan kebutuhan individu siswa dan konstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui sumber daya online dan juga, di dalam kelas, siswa tatap muka berdiskusi, berkomunikasi dan berbagi ide. Lebih memperhatikan pengalaman siswa selama proses mereka, yang memenuhi kebutuhan siswa di berbagai tingkat pembelajaran dan juga sangat membantu guru.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau kursus online terbuka telah merambah ekosistem pendidikan sehingga mengetahui masa depan pendidikan global dengan menggunakan model studi ini. Namun transformasi ini menuntut guru untuk menjadi pemimpin di kelas yang harus memiliki kompetensi bidang pengetahuan profesional dan penilaian yang mempunyai peran penting dalam pendidikan untuk mengetahui perkembangan dan keterampilan yang diperoleh siswa.

Prestasi baru-baru ini yang ditawarkan oleh model-model pendidikan ini ada beberapa karena mereka memberikan nilai tambah yang signifikan bagi siswa dengan menggunakan berbagai alat

teknologi yang merupakan bantuan penting dalam perolehan pengetahuan baru, semua perubahan dan tantangan yang diusulkan oleh para penulis ini telah tercermin dalam persyaratan dan tuntutan universitas yang telah mengadopsi model ini.

Ada beberapa negara yang telah menggunakan model pembelajaran modern yang proses belajar mengajarnya efektif. Di sisi lain, sumber daya teknologi yang digunakan di kelas tidak selalu menjadi yang terbaik bagi siswa. Karena beberapa di antaranya, menghadirkan permasalahan konektivitas, kualitas video, penanganan siswa yang datang ke kelas tanpa meninjau sumber daya tersebut dan juga kemungkinan siswa bertanya sambil menonton video dan tidak mendapatkan jawaban langsung adalah beberapa kelemahan yang mengadopsi hal tersebut. model pembelajaran di beberapa negara (Chairunnisa, 2023).

Ada dua jenis ruang kelas PIP. Model penguasaan PIP digunakan di ruang kelas karena bertujuan untuk mencapai standar di atas tingkat tertentu, jenis kelas terbalik ini diajarkan di kelas untuk mengajar siswa secara individu yang kurang belajar di kelas tatap muka. Ruang kelas PIP dan pembelajaran campuran telah meningkatkan kehadiran siswa dan menurunkan tingkat kegagalan mereka (Dimmera, 2020).

Di sisi lain, jenis kelas terbalik lainnya telah digunakan sebagai model pembelajaran tingkat lanjut dan berkapasitas tinggi yang akan mengajarkan konten yang lebih kompleks, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Metode kelas PIP ini telah digunakan di beberapa tempat dengan hasil yang sangat baik. Oleh karena itu, diusulkan agar siswa dibagi menjadi tiga kelompok dengan catatan waktu belajar mandiri dan tingkat pemahamannya kemudian akan mengikuti kelas tatap muka dan harus diverifikasi status siswa dalam pembelajarannya; kelompok telah terdiri antara siswa yang dapat memahami isinya.

Akibatnya siswa tidak dapat memahami karena tidak mempelajari sumber yang diberikan guru dan siswa tidak dapat memahami meskipun lama belajar sendiri. Jadi, model pembelajaran ini lebih efektif di kelas terbalik berkelompok dibandingkan dengan kelas terbalik konvensional, di mana guru mengirimkan materi dan tes kinerja belajar mandiri di rumah dan di sekolah dengan cara yang sama tes kinerja dan sumber daya teknologi dan akhirnya, a evaluasi akhir. Guru yang membimbing dengan hasil tersebut hendaknya dijadikan bahan pendukung untuk setiap kelompok dan memulai umpan balik yang aman.

Model ini telah mengidentifikasi beberapa cara untuk menerapkan pendekatan ini di kelas, di mana beberapa tautan harus digunakan sebagai tes, pertanyaan yang sering diajukan, eksplorasi kooperatif, bimbingan individual, latihan dan evaluasi sumatif. Di mana sumber daya teknologi telah dibuat oleh guru untuk pengembangan siswa sebelum kelas sehingga sangat menarik, tingkat yang wajar, menantang, bermanfaat dan guru tidak sepenuhnya dikecualikan dan memiliki interaksi yang konstan dengan siswa secara virtual, baik melalui surat, pesan, chat blog (Yangari, 2021).

Model pembelajaran ini selalu ditulis dengan tujuan didaktik: menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Untuk evaluasi kinerja dalam waktu biasa,

harus dievaluasi melalui partiPIPasi kelas, yang meliputi tugas sebelumnya ditambah penilaian kegiatan dan evaluasi dalam kelompok di antara mereka sendiri, untuk mengetahui kinerja yang benar dari setiap siswa dan keterampilan yang diperoleh dalam waktu biasa. kelas dan topik yang diusulkan. Dengan cara ini, baik siswa maupun guru akan memiliki tujuan yang jelas di depan kelas, dan akan bermanfaat bagi pemahaman yang mendalam tentang ilmu dan guru (Dienul Haq, 2023).

Guru telah mampu membuktikan pengetahuan yang diperolehnya melalui berbagai bentuk penilaian: eksperimen, permainan, pembelajaran online, membaca, belajar kelompok, dan umpan balik akan berhasil dilakukan dalam kelompok, di kalangan siswa harus segera diapresiasi jika model ini efektif sebagai mereka menghadirkan semangat, sikap belajar dan partiPIPasi sehingga interaksi kelas akan terlaksana dengan lebih efisien, dan siswa sendiri akan lebih mandiri dalam beraktivitas, kesimpulannya siswa akan mengalami peningkatan kualitas dalam pembelajaran sehari-harinya, yang memiliki dampak positif. perbedaan yang signifikan dengan permasalahan yang digagas di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan analisis, terbukti bahwa model pembelajaran ini lebih banyak digunakan di lembaga swasta yang jumlah siswanya sedikit karena mereka memiliki perangkat digital yang inovatif serta pelatihan guru dan siswa. Begitu pula dengan universitas, karena siswa bertanggung jawab atas pembelajaran mandiri dan dengan demikian mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat, yang telah terbukti bahwa pembelajaran dengan teknologi digital telah memberikan manfaat bagi siswa baik secara fleksibilitas maupun mobilitas, dengan model-model tersebut. siswa diharapkan memiliki apa yang disebut “normal baru” dalam pendidikan

Siswa memerlukan penerapan sumber daya teknologi dalam berbagai mata pelajaran, evaluasi, umpan balik dan pengembangan di kelas untuk meningkatkan proses belajar-mengajar secara signifikan dan siswa memperluas pengetahuannya. Di sisi lain, generasi mendatang harus didorong dalam kegiatan yang mengembangkan kompetensi, bentuk evaluasi baru yang melibatkan kecerdasan emosional, kerja kooperatif dan otonom, yang mempertimbangkan kecerdasan majemuk dan yang terpenting, penggunaan TIK untuk menerapkan metodologi aktif yang memberikan manfaat. siswa mengambil peran utama dan meninggalkan apa yang disebut “sekolah tradisional”.

Artikel ini menunjukkan hubungan antara model pembelajaran terbalik dan gabungan dalam skenario pendidikan tatap muka dan sinkron karena dapat diketahui bahwa penggunaan model pembelajaran baru ini di kelas secara sinkron dimana pembelajarannya didasarkan pada masalah, praktik, diskusi. Namun, dengan menghubungkan dan menggunakan model-model tersebut di kelas secara tatap muka dan sinkron, kapasitas siswa dikembangkan melalui perangkat teknologi di kedua bidang studi tersebut, dan pendidikan mereka menjadi lebih fleksibel dan aktif.

Sudut pandang penting lainnya adalah hubungan inovasi pendidikan dalam model hybrid, yaitu suatu bentuk pengajaran yang menggabungkan alat dan sumber pengajaran tatap muka dan jarak jauh untuk meningkatkan pengalaman siswa dan proses pembelajaran, yang dilakukan dari jarak jauh. dimana siswa dapat mengontrol waktu, ruang dan kecepatan aktivitasnya dan sebagian lainnya

dilakukan dengan pendampingan guru. Dengan cara yang sama, sumber daya pengajaran tatap muka dan jarak jauh dapat digabungkan ketika dibalik, dan pembelajaran gabungan digunakan dengan cara yang luar biasa untuk menerapkan pembelajaran aktif, mendorong pembelajaran bermakna, mendorong interaksi siswa-ke-siswa, yang mengarah pada untuk bekerja sama dan dengan demikian siswa memiliki kontrol yang lebih besar atas pembelajaran mereka, sehingga menumbuhkan otonomi.

Hasil analisis bibliometrik dapat dijelaskan menurut negara dan universitas yang lebih relevan dalam penggunaan model pembelajaran FL dan BL beberapa tahun terakhir di bidang pendidikan, dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya teknologi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas dan kecukupan pembelajaran. proses belajar-mengajar. Baik di universitas maupun negara, kompetensi digital guru memiliki peran mendasar dalam implementasi dan efektivitas berbagai sumber daya dan pendekatan didaktik, soroti dalam penelitian ini PIP dan Blended Learning sebagai model pendidikan yang inovatif.

Penting untuk ditekankan bahwa siswa memerlukan pembelajaran mandiri sebelum jam pelajaran agar mereka dapat memahami topik yang dibahas dengan lebih baik dan bersifat kolaboratif, di mana guru hanya sebagai pembimbing mereka. Di sisi lain, guru mengharuskan siswa untuk mengembangkan orientasi kejuruan yang dapat meningkatkan keterampilan profesional masa depan, kerja sama tim, integritas profesional, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta keterampilan intelektual seperti motivasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Tantangan dalam mengevaluasi konteks adalah ketidaksesuaian antara peraturan di tingkat pusat dan sekolah (peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh sekolah di daerah Indonesia, dan kurangnya sosialisasi peraturan terkait di sekolah. pelaksana program, yaitu sekolah. Tantangan dalam evaluasi input adalah data yang asynchronous dan validitasnya rendah, sehingga menyebabkan penerima program PIP kurang akurat, penerima PIP tidak tepat sasaran, dan penerima PIP tidak memiliki PIP. Pihak sekolah harus dilibatkan dalam verifikasi dan validasi siswa untuk menentukan siswa mana yang akan menerima dana PIP agar benar-benar tepat sasaran. Tidak ada SOP yang jelas antara data yang akan diserahkan sebagai database penerima PIP.

REFERENSI

- Chairunnisa, C., & Istaryatiningtias, I. (2023). Sebuah kajian tentang evaluasi Program Indonesia Pintar bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 12(2), 58. <https://doi.org/10.24036/jbmp.v12i2.124668>
- Dienul Haq, M., Suharso, P., & Sukidin. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Melalui Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Mtsn 5 Jember Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 17(1), 59–66. <https://doi.org/10.19184/jpe.v17i1.31537>

- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307–314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2022). Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar. *Kinerja*, 18(4), 539–546. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10097>
- Hafrienda, R., Candradewini, C., & Munajat, M. D. E. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sma Negeri Di Kota Bukittinggi. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 697. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45140>
- Huda, A. F. H., & Abidin, A. Z. (2023). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar KIP (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 17(12), 39–45.
- Jumanah, J., & Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 52–66. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.99>
- Liao, C. W., Tseng, Y. J., Liao, Y. H., Chen, B. S., Ho, W. S., Wang, I. C., Lin, H. I., & Chen, I. M. (2023). A Practical Curriculum Design and Learning Effectiveness Evaluation of Competence-Oriented Instruction Strategy Integration: A Case Study of Taiwan Skills-Based Senior High School. *Behavioral Sciences*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/bs13010043>
- Muqti, N. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Di Smp Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 6, 1–8.
- Ninghardjanti, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2023). Evaluation of the Smart Indonesia Program as a Policy to Improve Equality in Education. *Sustainability (Switzerland)*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/su15065114>
- Uriyalita, F., Syahrodi, J., & Sumanta. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon. *Edum Journal*, 3(2), 179–199. <https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i2.69>
- Yangari, M., & Inga, E. (2021). Article educational innovation in the evaluation processes within the flipped and blended learning models. *Education Sciences*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/educsci11090487>